

A

DA yang janggal di akun kripto Indra Kesuma alias Indra Kenz pada awal April lalu. Saldo di *wallet* Indra hanya tersisa Rp 165,5 juta. Padahal dia tengah ditahan setelah menjadi

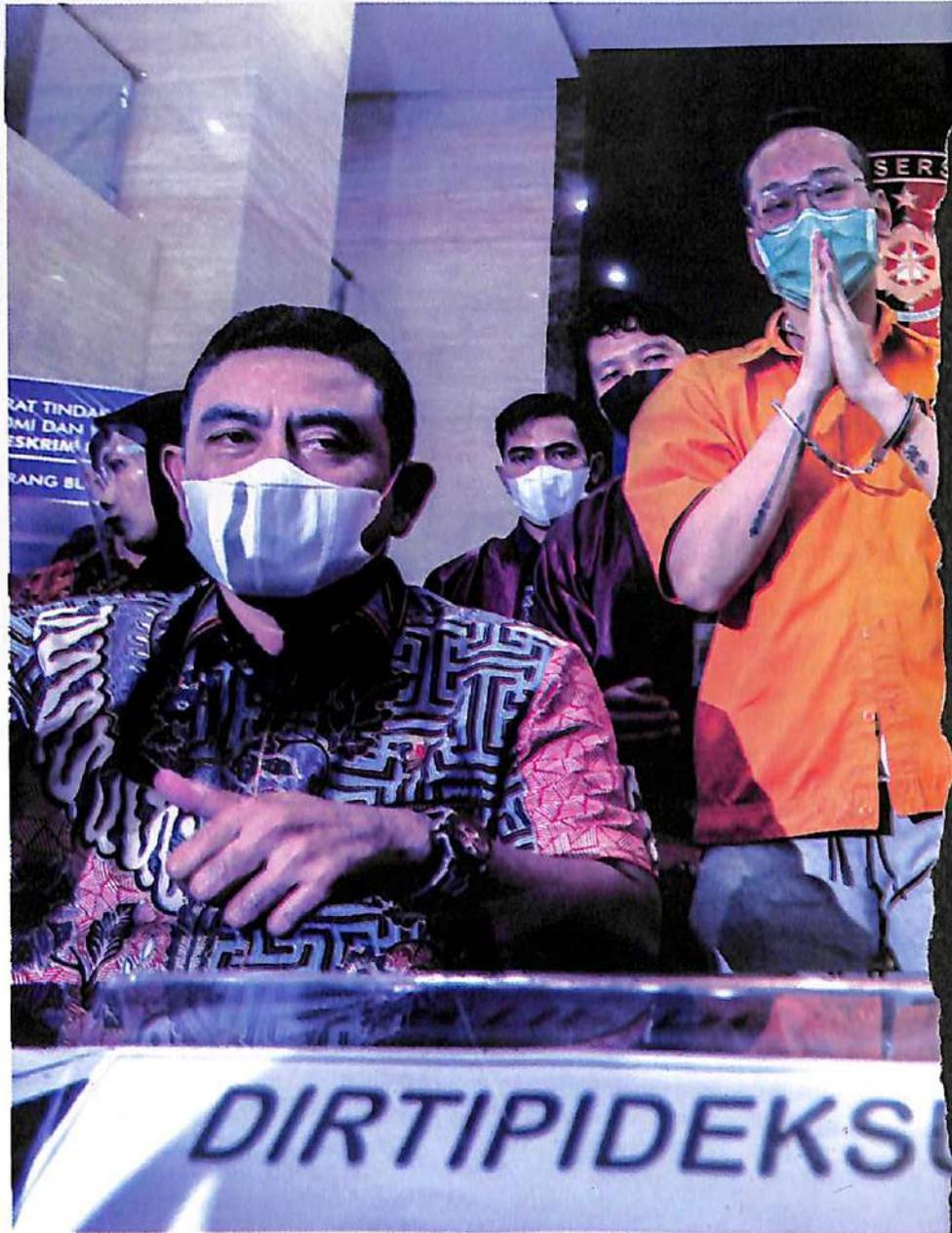
tersangka penipuan investasi *binary option* pada 25 Februari lalu. Tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga ada upaya pencucian uang di akun tersebut.

Tim PPATK lantas menelusuri dompet kripto pria 25 tahun itu. Ternyata, pemindahan koin-koin digital milik Indra Kenz dilakukan secara bertahap sejak Selasa pukul 20.00 hingga Rabu subuh, 5-6 April lalu. "Transaksi terjadi saat dia ditahan. Siapa yang mengoperasikan?" ucap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Jumat, 8 April lalu.

Indra diketahui memiliki 11 dompet digital yang menampung bitcoin (BTC), ethereum (ETH), dan billionhappyness (BHC) dengan nilai total Rp 57,44 miliar yang terdaftar di situs jual-beli aset kripto, Indodax, pada 18 Maret 2022. Sebelum sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI sudah memblokir semua aset "crazyrich" asal Medan itu, termasuk dompet kripto miliknya.

Anehnya, meski terblokir, kripto milik Indra tetap aktif. Sebanyak 42,6 BTC atau setara dengan Rp 26,6 miliar milik Indra berpindah ke akun lain pada Rabu pukul 20.30, 6 April lalu.

Setengah jam kemudian, sebanyak 39 BTC senilai Rp 19,9 miliar di dompet Indra yang lain ikut mengalir ke luar negeri. Secara keseluruhan, semua uang kripto Indra berpindah ke lima dompet baru. Nilai totalnya mencapai Rp 80,7 miliar. "Ada transaksi ke negara Balkan," ucap Ivan.



Identitas Samar Aset Kripto

Modus pencucian uang dengan mata uang kripto meningkat dalam beberapa tahun belakangan. Diduga dipraktikkan oleh tersangka investasi ilegal *binary option*, Binomo, Indra Kenz



PERPUSTAKAAN KPK
No. Buku: 2172/2022
No. Panggil: A ML 32



PPATK mengetahui nomor seri dompet penampung kripto Indra, tapi tidak mengetahui identitas pemiliknya. Karena pemilik akun diduga berada di Eropa, PPATK berencana menggandeng lembaga di negara setempat untuk menelusuri dan mengembalikan semua uang kripto itu ke Indonesia.

Tak mau kecolongan lagi, PPATK kembali menelusuri aset kripto Indra yang lain. PPATK menemukan uang digital Indra lain yang tersimpan di akun Indodax atas nama adiknya. Isinya setara dengan Rp 38 miliar. "Langsung kami bekukan," ujar Ivan.

Kunci pribadi (*private key*) akun kripto biasanya tersimpan di telepon seluler sang pemilik. Seseorang tak bisa bertransaksi jika tak bisa mengakses kunci tersebut. Indra semestinya tidak memegang ponsel

karena berada di bui.

PPATK tak bisa memastikan siapa yang memindahkan seluruh uang digital itu. "Bisa dia sendiri, bisa juga orang lain yang melakukannya," kata Ivan.

Awalnya, PPATK sempat kesulitan mengidentifikasi dompet kripto Indra dan para tersangka kasus investasi ilegal lain. Sebab, Indodax tak kunjung memberikan semua data yang dibutuhkan. Semua data baru diserahkan setelah pegawai PPATK mendatangi kantor Indodax di Jakarta. "Mereka beralasan tak memberi karena ada pergantian pegawai," tutur Ivan.

PPATK meyakini perpindahan uang kripto Indra merupakan pencucian uang. Ivan mengatakan sebenarnya Indra tak perlu khawatir jika aset-aset tersebut berasal dari sumber legal. Uang kripto yang

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Brigadir Jenderal Whisnu Hermawan (kiri) bersama Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri Komisaris Besar Gatot Repli Handoko (kanan) saat menggelar barang bukti kasus afiliasi Binomo Indra Kesuma atau Indra Kenz (tengah) di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, 25 Maret 2022.

disita pasti dikembalikan jika pengadilan menyatakan tak terkait dengan pidana yang didakwakan.

Itu sebabnya pemindahan kripto itu ditengarai bertujuan mengelabui aparat penegak hukum. Hal yang sama dilakukan para pelaku pencucian uang. "Transaksi IK (Indra Kenz) memperkuat dugaan kami bahwa telah terjadi pidana dan upaya pencucian uang yang lebih masif ke belakang," ujar Ivan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigadir Jenderal Whisnu Hermawan tak kunjung menerima permintaan wawancara *Tempo* ihwal pemindahan puluhan miliar rupiah uang digital milik Indra dari Indodax ke luar negeri. Pada akhir Maret lalu, Whisnu pernah mengklaim sudah berkomunikasi dengan Indodax dan menyita sekitar Rp 200 juta aset Indra Kenz di sana. "Kami akan terus mencari," katanya kala itu.

Chief Executive Officer Indodax Oscar Darmawan juga tak merespons permintaan wawancara *Tempo* hingga Sabtu, 9 April lalu. Surat juga dikirim ke kantor Indodax di Millennium Centennial Center, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Petugas satuan pengamanan gedung, Chandra Firdaus, mengatakan tak bisa menyampaikan surat tersebut ke manajemen Indodax. "Mohon maaf, kami tidak bisa menerima," ujar Chandra.

Kuasa hukum Indra Kenz, Wardaniman Larosa, juga enggan menjawab pertanyaan *Tempo*. "Mohon maaf, saya belum berkenan menjawabnya," ucap Wardaniman.

...

MODUS pencucian uang menggunakan kripto kian digemari para koruptor, teroris, penjahat siber, hingga bandar narkotik akhir-akhir ini. Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Dian Masyita, mengatakan pelaku kejahatan menyukai kripto karena setiap transak-

Pemain kripto tengah memantau pergerakan bitcoin di layar komputer dan telepon seluler miliknya di sebuah kafe di Jakarta, 20 Mei 2021.

Petugas Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI menyita aset dari tersangka Indra Kenz di Perumahan Cemara Asri, Sumatera Utara, 10 Maret 2022 (bawah).



si bisa dilakukan dengan pseudonim alias identitas samaran.

Identitas yang muncul berupa akun anonim dengan nomor seri. "Inilah yang kami khawatirkan dari 2017 ketika meneliti kripto. Banyak sekali peluang penipuan dan *money laundering* dengan adanya instrumen tersebut," ujar Dian pada Rabu, 6 April lalu.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebutkan penjahat di sejumlah negara, termasuk Indonesia, menggunakan mata uang kripto senilai Rp 91 miliar untuk pencucian uang pada 2017-2021. Modus ini ditengarai makin meningkat di masa mendatang.

Chainalysis, perusahaan periset *blockchain*, menyebutkan nilai pencucian uang lewat kripto di seluruh dunia mencapai US\$ 33 miliar atau setara dengan Rp 474,3 triliun sepanjang 2017-2021. Khusus 2021, nilai pencucian uang para penjahat di dunia ditaksir sebesar US\$ 8,6 miliar atau setara dengan Rp 123,6 triliun.

Di Indonesia, perdagangan kripto diawasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Namun pelanggaran masih saja terjadi karena regulasi yang lemah. Misalnya, alih-alih menggunakan rupiah, para pedagang memilih kripto sebagai alat pembayaran.

Dian mengatakan perdagangan kripto harus diawasi. Tanpa pengawasan, lalu lintas transaksi kripto bisa menjadi liar. "Pintu-pintu berkelitnya sangat banyak, apalagi teknologi memungkinkan itu terjadi," katanya.

Nilai transaksi kripto menembus Rp 859,4 triliun pada akhir 2021 atau naik



dari hanya Rp 64,9 triliun pada tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana, mengatakan lonjakan ini berbanding lurus dengan bertumbuhnya jumlah pelanggan yang mencapai 11,2 juta orang pada akhir 2021. "Puncak peningkatan transaksi pada April dan Mei tahun lalu," ujar Indrasari.

Ia mengakui tingginya nilai transaksi dan peminat koin digital belum diimbangi dengan kelengkapan lembaga perdagangan aset kripto di dalam negeri. Ia mencontohkan bursa aset kripto, kliring berjangka, dan lainnya harus segera dibentuk di Indonesia.

Saat ini baru 18 calon pedagang kripto yang terdaftar di Bappebti. Satu di antaranya dibekukan lantaran tidak memenuhi kewajiban. Bappebti juga telah mene-

tapkan 229 aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar dalam negeri.

Indrasari berjanji terus mengevaluasi jenis aset kripto dengan mengikuti arah perkembangan mata uang digital global. Bappebti juga terus mengawasi transaksi yang diselenggarakan bursa berjangka yang memperdagangkan kripto untuk memberi kepastian hukum. "Memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto dan mencegah tindak pencucian uang," tuturnya.

Modus pencucian uang menggunakan uang digital sebenarnya bukan hal baru. Bitcoin, mata uang digital pertama di dunia, lahir pada 2009. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mendeteksi pemanfaatan kripto sebagai sarana pencucian uang dilakukan di Indonesia sejak 2013.

Fenomena ini ditemukan ketika PPATK menyusun Peta Risiko Nasional Indonesia tentang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Pola ini diperkirakan terus berkembang. "Munculnya *blockchain*, bitcoin, ethereum, dan lainnya selalu membuka ruang untuk menambah tingkat risiko dari se-

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mendeteksi pemanfaatan kripto sebagai sarana pencucian uang dilakukan di Indonesia sejak 2013.

